

MEMBUMIKAN PLURALISME DI INDONESIA: MANAJEMEN KONFLIK DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Moh. Khoirul Fatih

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

E-mail: khoirulfatih12@gmail.com

Abstract: *Indonesia is a multicultural country with people living in diverse cultures, ethnics, and languages. Reality of plurality should not be ignored from our lives. Indonesia needs a conflict management in the life of a pluralistic society. For Facing this with all, we must apply a pluralism in plurality of religions and cultures. Therefore importance of dialogue as a means for mutual understanding between cultures and religions. In this article, idea of pluralism can be realized in a dialogue that is based on the guidelines of the nation contained in the values of Pancasila. While manage a conflict on dialogue, we also can increase development in our country with include discussion in various sector such as social, economy, and prosperity.*

Keyword: *Pluralism, Multicultural, Dialogue, Pancasila.*

Pendahuluan

Jauh sebelum mengalami kemerdekaan di tahun 1945, banyak sumber sejarah mencatat bahwa Indonesia pada masa Kerajaan diyakini masih bernama Nusantara. Saat masih bernama Nusantara, Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari kerajaan – kerajaan kecil. Namun di tahun 1945, negara ini resmi merdeka secara *de jure* dan *de facto*. Bukan menjadi hal yang mudah bagi *founding fathers* kita ini untuk menyatukan beragam budaya, suku bangsa, bahasa, serta etnis yang ada. Butuh waktu yang panjang untuk menyatukan keinginan dan cita – cita bersama untuk hidup bernegara di tengah keragaman yang ada. Sumpah pemuda menjadi sejarah yang sangat berarti bagi bangsa ini. Dalam Sumpah Pemuda ini tercipta sebuah pengakuan bersama untuk berbangsa satu.

Indonesia berusaha menuangkan berbagai macam kebijakan dalam pemerintahan yang dibentuk sebijak dan seadil-adilnya. Meskipun muncul pertanyaan yang cukup sulit untuk dipecahkan bersama. Pertanyaan ini muncul dari Niels Mulder, seorang antropolog yang telah lama melakukan riset di di Asia Tenggara, khususnya Indonesia terutama suku Jawa. Bagaimanakah sifat kekhususan dari Bangsa Indonesia ini?. Terdapat banyak pilihan jawaban, seperti Indonesia adalah Pancasila, atau budaya Indonesia yaitu budaya yang lebih *njawani* (dalam hal ini lebih mengedepankan suku jawa)¹. Namun menurutnya pula bahwa paham keagamaan yang tersebar dengan proses

¹ Niels Mulder, *Wacana Publik Indonesia: Kata Mereka tentang Diri Mereka*, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 304.

yang signifikan bukan pula merupakan sebuah ciri kepribadian Bangsa Indonesia.² Bila Mulder memaknai bahwa Indonesia tidak lebih dari sebuah perpecahan kaum santri dan abangan maupun dari sebuah sejarah panjang dari perlawanan antara negara dan Islam.³ Namun, sesungguhnya Indonesia dengan kemajemukannya telah melahirkan berbagai macam konflik yang tertulis di dalam sejarah kenegaraan kita. Hal ini tentunya tugas bagi kita untuk menciptakan suasana yang kondusif, stabil, damai, dan harmonis di tengah multikulturalisme. Konflik yang mengganggu stabilitas negara ini biasanya diwarnai dua hal yang paling menonjol, yaitu agama dan budaya, meskipun tidak jarang motif dari setiap konflik berbeda seperti politik, ekonomi, dan prestise. Hal ini menjadi suatu hal wajar mengingat Indonesia merupakan negara dengan 1128 suku bangsa.⁴ Kekayaan akan budaya dan keragaman suku yang menjadi warisan Indonesia selayaknya menjadi modal untuk meningkatkan pembangunan bangsa ini.

Namun bila tidak diurus dengan baik, maka keragaman ini akan menjadi polemik bagi bangsa itu sendiri. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya bila setiap elemen dari masyarakat yang tergabung dalam bangsa ini dapat menerima pluralitas yang ada dengan toleransi yang menciptakan keharmonisan. Memang sebuah cita – cita yang *utopis* bila kita benar – benar sanggup meniadakan sebuah konflik di dalam suatu wilayah, konflik selalu ada meskipun hanya dipendam dan bersifat psikis. Namun untuk menciptakan harmonisasi dan kedamaian, dibutuhkan kemampuan kita untuk mengelola konflik yang ada agar tidak pecah ke permukaan dan mengganggu stabilitas setiap kehidupan bermasyarakat.

Pluralisme Sebagai Tawaran Dalam Kehidupan Bermasyarakat Di Indonesia

Pluralisme lahir di Indonesia sebagai sesuatu hal yang menjadi kontroversial. Keberadaannya diwarnai dengan perdebatan di berbagai kalangan. Pluralisme sesungguhnya merupakan ekspresi dari pandangan seseorang yang melihat keberagaman penganut agama lain. Namun, hal ini dimaknai dengan intepretasi yang berbeda oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). MUI memiliki peran sebagai penghubung antara ulama dan pemerintah, memiliki wewenang untuk memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan Masyarakat.⁵ Dalam hal ini MUI pun memberikan responnya melalui fatwa haram terkait dengan pluralism agama dalam keputusan fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/II2005.

Fatwa haram ini didasarkan pada intepretasi MUI yang menyatakan bahwa pluralisme agama yaitu suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama ialah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif, oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain yang salah, pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama

²*Ibid*

³*Ibid*

⁴ Data didasarkan pada laporan Badan Pusat Statistik, 2010 <http://www.jpnn.com> diakses pada tanggal 20 November 2018.

⁵ Dikutip dari Wadah Musyawarah Ulama, Zuama dan Cendekiawan, <http://mui.or.id> diakses pada tanggal 20 November 2018

akan masuk dan hidup berdampingan di surga.⁶ Berdasarkan hal ini, MUI terkesan memberikan respon inklusif yang cenderung bersifat tertutup. Pluralisme dipandang sebagai sesuatu yang kurang relevan diterapkan di Indonesia bila berdasar pada penetapan fatwa ini.

Namun berbeda dengan para tokoh di Indonesia yang memberikan intepretasi berbeda mengenai pluralisme. Seperti Nurcholis Madjid mengintepretasi pluralisme sebagai suatu sistem yang berdasar pada nilai yang melihat secara positif serta optimis terhadap kemajemukan melalui sikap mau menerima sebagai sebuah realitas dan berbuat sebaik mungkin berdasarkan realitas tersebut.⁷ Masyarakat Indonesia merupakan refleksi dari suatu kondisi yang majemuk. Populasi penduduk yang tidak sedikit, serta jumlah etnis budaya telah mewarnai kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini, tidak jarang menjadi pemicu konflik yang berujung pada terganggunya stabilitas keamanan negara. MUI sebagai penyambung aturan antara masyarakat dengan pemerintah yang berdasar pada syariat Islam memiliki dampak yang bersifat *overlapping* dengan para tokoh dan cendekiawan yang memiliki pemikiran “kebarat-baratan”. Di satu sisi MUI yang berada dalam naungan pemerintah terkesan memiliki *power* yang tercermin di dalam wewenangnya mengeluarkan fatwa, namun tidak memiliki muatan hukum yang mampu memberikan sanksi apabila terdapat warga negara yang melanggar fatwa yang dikeluarkannya. Hal ini dipaparkan sebagaimana tertulis di dalam buku yang berjudul Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Agama yaitu:⁸

“Sebagai pengemban ilmu, Alim Ulama ini tidak mempunyai kewenangan memberikan keputusan, baik dalam arti perundang – undangan (tasyri) maupun dalam arti peradilan (qadla’) namun tetap mempunyai otoritas ilmiah, yang mengikat secara moral maupun peribadatan.”

Berdasarkan hal di atas, dapat dipahami jelas bahwa alim ulama yang tergabung di dalam MUI tidak memiliki kewenangan di dalam memberikan sanksi hukum terutama baik di bidang peradilan maupun perundangan namun tetap mengikat secara moral. Sejatinya, Indonesia merupakan negara yang demokratis dimana terdapat kebebasan berfikir dan berpendapat bagi warga negaranya. Keterbukaan terhadap kebebasan berfikir inilah yang kemudian menimbulkan ketidakjelasan arah terhadap implementasi penerapan aturan yang ditetapkan pemerintah melalui MUI, ini pulalah yang dikhawatirkan melahirkan ambiguitas terhadap pemahaman pluralisme pada masyarakat Indonesia khususnya di masyarakat awam. Bila dalam kalangan akademis hal ini mungkin tidak akan menimbulkan kegelisahan yang berarti, namun di kalangan *grassroot* tentunya dapat menimbulkan kebingungan.

Sejauh ini pluralisme masih diterima sebelah mata, tidak jarang beberapa kalangan eksklusif cenderung tidak sepakat untuk menerima pluralisme di Indonesia. Terkadang kalangan eksklusif ini terlahir dari beberapa golongan yang berpendidikan

⁶ Dikutip dari Fatwa MUI-Pluralisme/Islam Liberal Sesat, <http://median.islam.or.id> diakses pada tanggal 20 November 2018

⁷ Kompasiana, Islam dan Pluralisme di Indonesia dalam <http://m.kompasiana.com> pada tanggal 20 November 2018.

⁸ Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, *Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia*, (Jakarta:Departemen Agama RI, 1984), 90.

tinggi. Berdasarkan realita yang terjadi, segelintir oknum yang mengatasnamakan mahasiswa yang berstatus mahasiswa Islam memiliki sikap intoleransi yang dinilai cukup mengkhawatirkan bila mengingat statusnya sebagai *agent of change* bangsa ini.⁹ Hal ini tercermin dari arogansi dan kurangnya etika dalam melakukan dialog antar agama. Dalam hal ini, sepertinya kita perlu mengaplikasikan dan mempublikasikan beberapa prinsip – prinsip dialog yang diusung oleh Leonard Swidzler. Dalam dialog antaragama, Leonard Swidzler mengemukakan sepuluh prinsip dalam dialog, di antaranya yaitu:¹⁰

1. Tujuan utama dari dialog adalah belajar mengubah persepsi.
2. Harus dibedakan mana dialog antaragama dan mana interagama.
3. Setiap peserta harus menjalankannya dengan kejujuran dan kerendahan hati (saling percaya).
4. Tidak seharusnya dijadikan sebagai ajang untuk komparasi atau perbandingan.
5. Setiap peserta diharuskan menjelaskan pendefinisian mengenai jati diri agamanya masing – masing.
6. Tidak diperkenankan menjustifikasi secara langsung terhadap *statement*
7. Posisi dialog haruslah *equal*.
8. Diharuskan untuk saling percaya.
9. Harus mampu mengkritik dirinya sendiri terhadap tradisi keagamaannya.
10. Harus belajar dari pengalaman keagamaan *partner*. Dalam hal ini merupakan pemahaman secara mendalam dilakukan untuk memahami *spiritual experience partnernya*.

Prinsip – prinsip di atas, hendaknya menjadi acuan pada setiap tindakan kita di dalam etika berdialog. Meskipun kesepuluh prinsip ini terkesan idealis, Namun sebenarnya, perumusan sepuluh prinsip yang diusung oleh Lenard Swidzler ini tidak lain merupakan bagian dari etika dan moral yang sudah ada di dalam dialog kehidupan. Dalam menjalani kehidupan, manusia cenderung dapat berinteraksi dengan penggunaan bahasa yang baik dan tidak melanggar nilai moral dan norma sosial. Penggunaan kata – kata yang tidak pantas ataupun pemilihan diksi yang tidak sesuai dengan norma sosial secara otomatis akan mengundang konflik. Hal ini tentunya dilatarbelakangi karena belum mampunya suatu individu menerima pluralitas dengan bijak sesuai nilai – nilai pluralisme yang bersumber pada nilai humanisme.

Di dalam lapisan masyarakat yang cenderung bersifat inklusif, Pluralisme dimaknai sebagai sesuatu yang normatif. Dalam hal ini, pluralisme hanya terimplementasi melalui sikap toleransi semata yang didasarkan pada norma dan nilai humanis. Bukan pluralisme yang dipahami oleh Diana L Eck yang memandang bahwa pluralisme didasarkan pada pemahaman secara mendalam dan perlunya keterlibatan

⁹ Berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis yang turut terjun dalam diskusi keagamaan di salah satu Universitas Islam di Indonesia. Dari diskusi tersebut terlihat adanya sentimen dari segelintir orang yang mungkin kurang memahami prinsip dialog antaragama kemudian menimbulkan ketegangan di dalam dialog. Selain itu juga mereka kurang memahami akan tujuan dialog. Oknum tersebut lebih mengedepankan ego dan eksklusivitas dan merasa agamanya yang paling benar. Disinilah pentingnya pemahaman makna dan intepretasi mendalam akan publikasi dan mengenalkan semua asas – asas dan aturan dialog. Yang menjadi keprihatinan penulis, hal ini pun diamini oleh salah seorang oknum yang menyatakan aktif di forum diskusi dan dialog antar agama (seperti FKUB). Berdasarkan hal ini, kita pun perlu menanamkan rasa kepekaan dan kepedulian terhadap praktek dialog antar agama yang dirasa kurang bersifat *equal*.

¹⁰ Leonard Swidzler, *The Dialogue Decalogue*, 2003 Journal of Ecumenical Studies.

aktif yang dibangun dalam dialog antara agama.¹¹ Dalam tataran *grassroot*, dialog yang terjadi hanya sebatas dialog *everyday life*, hal ini lah yang mencerminkan bahwa pluralisme yang ada saat ini masih bersifat normatif di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Normatif di sini dimaksudkan bahwa dialog yang terjadi di kehidupan sehari – hari hanya terjadi didasarkan pada norma dan nilai moral yang berkembang di masyarakat Indonesia yang terkenal dengan budaya senyum sapa dan ramah tamahnya. Pluralisme yang ditentang oleh MUI merupakan pluralisme agama dengan intepretasi dan definisi yang disadur dari KBBI. Sedangkan upaya menghidupkan pluralisme disini bukan hanya dalam segi agama. Namun pluralisme terhadap budaya lainnya. Dalam hal ini, pluralisme dimaknai sebagai suatu sikap yang mampu menerima perbedaan. Perbedaan disini bukan hanya berlatarbelakang pada perbedaan agama saja, tapi juga perbedaan terhadap budaya lain. Mengingat Indonesia kaya pula akan beragam kebudayaan dan suku bangsa.

Upaya Pluralisme Dalam Mengurangi Konflik Di Indonesia

Pemahaman konsep pluralisme yang diusung oleh Diana L Eck merupakan sebuah pandangan yang melihat perbedaan komunitas dan pandangan keagamaan bukanlah menjadi penghalang, melainkan sebuah peluang untuk terciptanya dialog.¹² Dalam hal ini, dialog terlihat sebagai sebuah produk yang terbentuk dari adanya pluralisme. Dialog dianggap sebagai bagian dari upaya dari pluralisme untuk mengurangi konflik.

Berangkat dari dialog, Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Dalam hal ini, Indonesia telah memulai forum dialog ini dalam musyawarah antaragama di tahun 1967 yang kemudian dilanjutkan oleh Mukti Ali di tahun 1967-1978 sebagai Menteri Agama saat itu yang dikenal dengan istilah *agree in disagreement*.¹³ Perjalanan panjang dialog di Indonesia tercipta sebagai upaya dan usaha untuk menciptakan keharmonisan kehidupan bernegara.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi pancasila. Bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa yang merefleksikan perbedaan dalam kesatuan yang tunggal. Begitu pula dengan Amerika Serikat yang merupakan negara dengan sistem demokrasi pun memiliki semboyan *Unity on Diversity*. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara ini dibangun dengan fondasi masyarakat yang majemuk. Kemajemukan ini tentunya terdiri dari banyaknya budaya yang ada. Perbedaan di antara kemajemukan ini tentunya dimaknai dengan realitas pluralisme yang mau saling menerima perbedaan serta saling memahami demi persatuan bangsa dan negara.

Perubahan yang terjadi pada alinea awal yang menghilangkan “syariat Islam” pada piagam Jakarta merupakan cermin bahwa Indonesia bukanlah negara Islam. Indonesia merupakan negara dengan sistem demokrasi pancasila yang menerima

¹¹Pemikiran Diana L Eck dalam *Is Our God Listening? Exclusivism, Inclusivism, and Pluralism in Islam and Global Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Peace*, (London: Queen Mary College University, 2005).

¹² Pemikiran Diana L. Eck dalam *Is Our God Listening? Exclusivism, Inclusivism, and Pluralism in Islam and Global Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Peace*, (London: Queen Mary College University, 2005).

¹³ J. B Banawiratma, Zainal Abidin Bagir, dkk, *Dialog Antarumat Beragama Gagasan dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2010), 41.

perbedaan sebagai pemersatu bangsa. Indonesia juga bukanlah negara yang hanya dimiliki oleh umat Islam saja. Bila kita disudutkan pada pertanyaan, “apakah kita orang Islam yang tinggal di Indonesia? Atau orang Indonesia yang beragama Islam?¹⁴”. Pilihan yang pertama, tentunya mencerminkan bahwa kita merupakan pribadi yang cenderung memperlihatkan fanatisme terhadap agama tanpa mengindahkan esensi nasionalisme. Sedangkan pilihan yang kedua mengedepankan nilai nasionalisme tanpa menghilangkan aspek keberagaman kita dan juga menunjukan Islam yang moderat. Pada akhirnya setiap jawaban yang kita pilih mencerminkan diri kita dalam memaknai pluralitas yang ada dan bahkan mencerminkan nasionalisme kita.

Di Indonesia terdapat pengakuan terhadap enam agama resmi serta terjaminnya bagi kepercayaan lokal menjalankan keagamaannya. Hal ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menghidupkan kemajemukan yang damai dan tanpa konflik. Namun bagaimanakah pluralitas dapat dioperasionisasikan di negara dengan mayoritas penduduknya menganut Islam?. Ini bukanlah tanggungjawab bagi umat Islam saja yang mendiami NKRI. Untuk menciptakan sebuah keharmonisan di dalam suatu wilayah, dibutuhkannya kerjasama dan peran dari semua pihak. Untuk itu sebagai warga negara Indonesia, kita tentunya perlu memupuk pluralisme sebagai bentuk kesadaran diri bahwa Indonesia dibentuk berdasarkan kemajemukan yang nyata, bukan didasarkan hanya salah satu etnis atau komunitas yang dominan.

Sebagai reduksi dari pluralisme, dialog dianggap sebagai upaya alternatif yang dapat mengurangi konflik serta memelihara stabilitas negara. Dibandingkan dengan upaya lain, dialoglah yang dirasa cukup efektif untuk menyelesaikan konflik yang ada. Bila kita telisik saat masa Pemerintahan Orde Baru terdapat peran ganda atau dwi fungsi ABRI di dalam parlemen. Tidak hanya di parlemen militer yang memiliki peran besar, namun sejarah mencatat bahwa dalam beberapa konflik yang terjadi di Indonesia militer lah yang memegang peranan penting. Sebagai catatan, dalam konflik di Ambon, Poso dan Papua pihak pemerintah mengirimkan pasukan militer terlebih dahulu ke wilayah konflik tersebut dibandingkan mengirim pemuka agama untuk menyelesaikan konflik. Meskipun di saat – saat terakhir ketika konflik mulai usai, terdapat upaya penyelesaian konflik berupa dialog di antara pihak yang berseteru, namun tidak menghilangkan esensi dominasi *hard power* di dalam penyelesaian konflik saat itu. Bila dianalisis, penyelesaian konflik yang hanya bertumpu pada satu upaya seperti penggunaan militer sebagai *hard power* atau penggunaan media dialog sebagai *soft power*, tetap saja kedua strategi ini tidak dapat dipisahkan dari resolusi konflik.

Diharapkan *decision maker* dalam pemerintahan dapat merumuskan formulasi strategi yang mengkombinasikan *hard* dan *soft power* di dalam kebijakannya. Memang pada dasarnya pada masa Orde Baru, situasi stabilitas negara cenderung stabil dan aman. Namun harus kita telaah lebih dalam, bahwa Orde Baru ini merupakan masa dimana Indonesia dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang otoriter. Salah satu indikator suatu negara menjalankan pemerintahannya dengan otoriter dapat dilihat dari seberapa besarkah peran militer dalam suatu negara. Kondisi yang aman dan stabil ini dapat diprediksi sebagai kondisi yang dipaksa dan sengaja “dibuat” stabil. Hal ini terbukti banyaknya pelanggaran HAM serta “dibredelnya” pers untuk tidak leluasa

¹⁴ Merupakan pertanyaan yang menjadi bahan diskusi dalam pertemuan bedah buku “*Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*” karangan Prof. DR . Faisal Ismail, M.A (beliau merupakan guru besar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) di UIN Sunan Kalijaga pada tanggal 28 September 2015.

menampilkan berita yang mengkritik pemerintahan pada masa itu. Pada era terkini, sebaiknya pemerintah dapat merumuskan strategi pemerintahan yang lebih matang berbekal pengalaman pemerintahan sebelumnya.

Mengelola Konflik Dalam Masyarakat Multikultural

Tantangan global selalu muncul dan berbeda – beda bentuknya sesuai dengan perkembangan zaman. Keberadaan manusia adalah sebuah kebutuhan fisio psikis rohani, sedangkan manusia Indonesia memahami dimensi ini dalam sebuah lingkungan kebudayaan yang berkarakter khas.¹⁵ Maka dari itu pembangunan yang melingkupi manusia dan masyarakat Indonesia dilakukan melalui pengembangan sejumlah unsur serta keinginan yang dipunyai dalam rangka pembentukan dari kesejahteraan jiwa raga melalui aspek religious, kultural, sosial, fisik, dan ekonomi.¹⁶

Sebagai bangsa yang berdaulat, kita tidak dapat menolak arus globalisasi dan sistem internasional yang kini bersifat *borderless*. Menurut Mukti Ali dalam bukunya yang berjudul *Agama, Kebudayaan, dan Pembangunan* mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang terbuka, baik dalam modal asing, maupun bagi masuknya arus agama – agama besar serta kebudayaan.¹⁷ Ditambah lagi Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan ragam suku dan budaya, namun tidak jarang juga kemajemukan ini melahirkan beberapa konflik. Sangat disadari bahwa ini menjadi beban berat bagi kita semua. Secara internal, kita harus mengelola kemajemukan agar tidak menjadi perselisihan, namun di eksternal kita harus mampu menghalau tantangan yang ada.

Maka dari itu untuk menghalau tantangan dari luar kita harus memperkuat fondasi dari dalam bangsa ini sembari menghalau tantangan arus globalisasi di tengah arus persaingan global. Yang harus dimulai dari membumikan pluralisme di dalam kehidupan yang multikultur yaitu menanamkan nilai – nilai dari pluralisme itu sendiri. Pluralisme disini merupakan rasa menerima perbedaan dan menghargai baik dari segi budaya maupun agama. Untuk konteks Indonesia sendiri, kita harus kembali lagi terhadap pedoman yang dianut oleh bangsa kita. Nilai – nilai Pancasila telah merefleksikan ide – ide pluralisme. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, kesejahteraan merupakan konsep kunci dari nilai Pancasila yang seharusnya menjadi titik awal kita berperilaku. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan maupun kekuatan spiritual tidak dapat dipisahkan dalam setiap elemen kehidupan. Nilai – nilai Ketuhanan beriringan dengan keimanan mengatur seperangkat norma serta doktrin di dalam agama. Nilai – nilai kemanusiaan pun menjadi perhatian penting dalam kehidupan. Ketuhanan dan kemanusiaan menjadi konsep penting dalam universalitas. Dengan membumikan pluralisme di Indonesia melalui nilai Pancasila, setidaknya kita mampu mengelola konflik dengan menghindari eksklusivitas diri terhadap klaim –klaim kebenaran yang hakiki terhadap budaya maupun agama sendiri.

Perbedaan budaya dan etnis tertentu dalam bangsa ini seyogyanya dijadikan keragaman bangsa. Untuk menghindari gesekan di kalangan *grassroot*, ada baiknya setiap entitas yang ada harus mampu menerima keragaman. Menurut Faisal Ismail

¹⁵ Mukti Ali, *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan: Menyongsong Era Industrialisasi*, (Yogyakarta: SUKA Press, 1988), 17 -18.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Kerukunan Antar Umat Beragama*, penerimaan keragaman ini didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:¹⁸

1. Perlunya menjunjung prinsip dari keragaman di dalam kesatuan yang menjadi pedoman dasar negara kita.
2. Bagi kelompok etnis pendatang perlunya menumbuhkan rasa saling menghormati seperangkat aturan nilai dan budaya setempat.
3. Untuk masyarakat lokal setempat hendaknya menjauhkan kecemburuan terhadap kesuksesan etnis pendatang di segala bidang.
4. Membuang jauh rasa superioritas terhadap etnis sendiri agar dapat mengikis primordialisme.
5. Mengembangkan pendidikan multikultural.¹⁹ Pendidikan multikultural ini dikombinasikan dengan pendidikan multi-etnik.²⁰
6. Memperluas dan mendalami sikap pluralisme dan inklusif dalam segala aspek kehidupan baik kebudayaan maupun keagamaan.

Hal diatas tentunya juga diadaptasi dengan paham kebhinekaan agar senantiasa beriringan dengan pedoman dan cita – cita bangsa. Bila kita sulit membumikan pluralisme di Indonesia, setidaknya kita telah mencoba mengelola konflik. Meskipun cita – cita pluralisme dianggap terlalu ideal, situasi suatu wilayah tanpa adanya konflik dapat tercipta dengan adanya rasa inklusivisme yang terbuka. Sebagaimana Diana L Eck mengemukakan dalam artikelnya bahwa inklusivisme yang bersifat terbuka mampu mendorong perubahan ke arah menuju pluralisme.²¹ Yang demikian ini didasarkan karena adanya keterbukaan dari inklusivisme untuk memahami dan mendengarkan suara dari agama lain.

Akan tetapi dalam pemikiran Abdul Aziz Sachedina mengatakan bahwa pluralisme agama dapat menghasilkan prinsip inklusivitas sebagai dampak positif dari sebuah komunitas agama yang mampu mengedepankan pluralisme. Inklusivisme disini dimaksudkan bahwa ini mencerminkan sebuah kondisi yang lebih mengutamakan akomodasi di antara banyak klaim kebenaran agama dalam masyarakat yang heterogen baik secara budaya maupun agama.²²

Maka dari itu, upaya membentuk pluralisme maupun inklusivisme dapat melahirkan sebuah keharmonisan sebagai bagian dari usaha mengelola konflik di Indonesia sebagai negara dengan masyarakat multikultur. Namun, tidak boleh luput dari perhatian kita, bahwa toleransi pun harus memperhatikan beberapa batasan. Dikutip dari Mukti Ali, sebagaimana pemikiran Alwi Shihab menekankan pembatasan penting

¹⁸ Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 100-101

¹⁹ Pemikiran Faisal Ismail dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 100-101

²⁰ Berdasarkan analisis penulis yang bersumber dari pemikiran Faisal Ismail dalam bukunya yang berjudul *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, dikombinasikan dengan pemikiran Wakhinuddin (Dosen FT-UNP) dalam tulisannya *Pembentukan Peradaban Bangsa Melalui Pengajaran Multi-etnik dalam Era Reformasi*, 2003, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* No.41 tahun Ke-9 Maret 2003, 269-289.

²¹ Diana L.Eck dalam *Is Our God Listening? Exclusivism, Inclusivism, and Pluralism in Islam and Global Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Peace*, (London: Queen Mary College University, 2005).

²² Biyanto: *Perspektif Keagamaan dalam Perdebatan Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah*, (Malang: UMM Press, 2009), 67.

pluralisme yaitu dengan mengedepankan komitmen yang kokoh terhadap agama masing-masing.²³

Kesimpulan

Keragaman dan perbedaan adalah sunatullah yang tidak dapat ditolak realitanya. Indonesia yang kaya akan ragam etnisnya sudah sepatutnya menjaga dan memelihara kekayaannya ini. Terdapat 600 bahasa dan dialek – dialek yang digunakan penduduk Indonesia telah memperlihatkan tidak sedikitnya kelompok etnis yang mendiami negeri Indonesia ini.²⁴ Multikultur ini selain menjadi warisan kekayaan negeri ini, namun juga menjadi beban berat untuk dikelola dengan baik.

Secara logika, banyaknya ras dan multi-etnis ini dapat dinilai sebagai potensial konflik. Selain itu pula Indonesia sebagai negara yang mengakui enam agama resmi dunia secara langsung harus mampu bersinergi dengan kebudayaan lokal agar yang variatif. Baik pluralisme agama maupun pluralisme budaya seyogyanya mampu hadir dan diaplikasikan oleh setiap elemen masyarakat.

Pengelolaan konflik dalam masyarakat multikultur ini membutuhkan peran dari banyak lapisan. Dalam hal ini, peran dari aktor negara dan non negara sangat dibutuhkan, meliputi Kementerian Agama, NGO, Kedutaan Besar, Mahasiswa, tokoh agama, dan lapisan masyarakat. Peranan dari semua pihak yang disebutkan tersebut, hendaknya dapat melalui forum dialog. Dialog disini bukan merupakan dialog yang dijadikan sebagai media untuk menguasai yang lainnya dan menjadikan agamanya sebagai satu-satunya yang benar. Bila dialog dengan tujuan seperti ini, dapat dipahami bahwa ini berjalan dan berangkat dari rasa eksklusivitas yang mendalam.

Untuk itu beberapa prinsip-prinsip dalam mengelola konflik di atas dapat diterapkan pada setiap individu. Penting juga dalam dialog untuk memunculkan keberanian di setiap agama maupun kebudayaan untuk memunculkan nilai – nilai humanisme yang sudah dikenal secara universal, serta menjalin dialog dengan membahas berbagai bidang kehidupan lainnya. Sehingga selain bisa mengelola konflik dengan melakukan tindakan preventif, namun bisa pula untuk meningkatkan dan kemajuan bangsa.

Daftar Pustaka

- Ali, Mukti, (1988), *Agama, Kebudayaan dan Pembangunan: Menyongsong Era Industrialisasi*, Yogyakarta: SUKA Press.
- (2009), *Pluralitas Bukan sekedar Diversitas: Telaah atas Kondisi Keberagaman di Amerika*, April-Juni 2009, Jurnal Multikultural Vol.VII No.30.
- Banawiratma, J.B, Bagir, Zainal Abidin, dkk, (2010), *Dialog Antarumat Beragama Gagasan dan Praktik di Indonesia*, Jakarta: Mizan.
- Biyanto, (2009), *Perspektif Keagamaan dalam Perdebatan Pandangan Kaum Muda Muhammadiyah*, Malang: UMM Press.

²³ Mukti Ali, *Pluralitas Bukan sekedar Diversitas: Telaah atas Kondisi Keberagaman di Amerika*, Jurnal Multikultural Vol.VII No.30 April-Juni 2009, hlm.54.

²⁴ Tarmizi Taher, *Menuju Ummatan Wasathan: Kerukunan Beragama di Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 1998), 57.

- Eck, Diana L, (2005), *Is Our God Listening? Exclusivism, Inclusivism, and Pluralism in Islam and Global Dialogue: Religious Pluralism and the Pursuit of Peace*, London: Queen Mary College University.
- Ismail, Faisal, (2014), *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kleden, Paulus Budi, (2002), *Dialog Antaragama dalam Terang Filsafat Proses Alfred North Whitehead*, Ledalero, Maumere.
- Mulder, Niels, (2003), *Wacana Publik Indonesia: Kata Mereka tentang Diri Mereka*, Yogyakarta: Kanisius.
- Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, (1984), *Monografi Kelembagaan Agama di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Swidzler, Leonard, (2003), *The Dialogue Decalogue*, Journal of Ecumenical Studies.
- Taher, Tarmizi, (1998), *Menuju Ummatan Wasathan: Kerukunan Beragama di Indonesia*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Wakhinuddin, (2003), *Pembentukan Peradaban Bangsa Melalui Pengajaran Multietnik dalam Era Reformasi*, Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.41 tahun Ke 9, 2003.
- Badan Pusat Statistik, <http://www.jpnn.com>, diakses pada tanggal 20 November 2018.
- Fatwa MUI-Pluralisme/Islam Liberal Sesat, <http://media-islam.or.id>, diakses pada tanggal 20 November 2018.
- Kompasiana, Islam dan Pluralisme di Indonesia dalam <http://m.kompasiana.com>, pada tanggal 20 November 2018.
- Wadah Musyawarah Ulama, Zuama dan Cendekiawan, <http://mui.or.id/sekilas-mui>, diakses pada tanggal 20 November 2018.